

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Suatu organisasi dalam mewujudkan tujuannya diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Dalam tumbuh kembang suatu organisasi bergantung pada sumber daya manusianya yang memiliki kualitas yang tinggi. Oleh karena itu, SDM harus diperhatikan dengan baik agar terjadi peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja yang tercermin pada kinerja semua pihak, khususnya para anggota penanggungjawab bidang fungsional, baik yang masuk kategori tugas pokok maupun tugas penunjang serta pimpinan penyelenggara kegiatan operasional yang dibantu karyawan teknis, operasi dan administratif.

Sumber daya manusia merupakan salah satu aset sebuah organisasi yang paling berharga, karena dengan sumber daya manusia yang baik maka diharapkan mampu untuk menjawab semua tantangan yang datang baik dari dalam maupun luar organisasi untuk mencapai tujuan organisasi (Mangkunegara, 2015 : 4).

Kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan dapat terpenuhi dengan dilakukannya pengembangan yang mengarah kepada pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia. Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM), terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. Usaha pemerintah Indonesia untuk memulihkan kondisi ekonomi, sosial dan politik adalah dengan

mengembalikan pemerintah yang bersih dan berwibawa atau yang dikenal dengan istilah *good governance* (Mukarom, 2017:12 ).

Perwujudan *good governance* adalah dengan dikeluarkannya Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yang mengatur tentang pengolahan keuangan daerah. Selain itu, pemerintah lewat peraturan PP No. 24 Tahun 2005 telah mengeluarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas agar terwujudnya sebuah *good governance*. Inspektorat merupakan salah satu perangkat pemerintahan daerah di Kabupaten OKU yang ditugaskan untuk melakukan pengawas atas penyelenggaraan laporan keuangan di pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Bupati, secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah sedangkan fungsinya untuk melakukan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati; penyusunan laporan hasil pengawasan; pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten/kota; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Dalam hal ini tentunya inspektorat menjaga akuntabilitas dalam bekerja agar tetap menjadi *good governance* terutama tentang laporan akuntansi.

Laporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintahan dalam membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik. Semakin berkembangnya teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat untuk menilai dan membandingkan suatu entitas dengan entitas lain. Untuk itu, tuntutan penyediaan informasi termasuk informasi keuangan dan akuntansi semakin dibutuhkan. (Sedarmayanti, 2017 : 12).

Tidak menutup kemungkinan jika ingin mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman akuntansi pada pegawai negeri selain dilihat dari latar belakang pendidikan, bahwa pelatihan bagi pegawai juga merupakan faktor yang mendukung dalam mengukur tingkat pemahaman akuntansi sektor publik. Pegawai yang pernah mengikuti pelatihan, baik yang diadakan oleh instansi atau bukan akan lebih mudah dalam mengerjakan pekerjaannya. Melalui pelatihan, pegawai terbantu dalam mengerjakan pekerjaan yang ada, dapat meningkatkan keseluruhan karir karyawan dan membantu mengembangkan tanggung jawabnya di masa depan. Selain itu, pegawai tersebut juga akan lebih mengerti tentang tujuan organisasi (Mangkunegara, 2017: 43).

Berdasarkan hasil observasi awal diketahui jika Kantor Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan lembaga pengawas internal pada satuan kerja di Kabupaten OKU. Akuntansi pemerintahan sebagai pengawas merupakan suatu keilmuan akuntansi yang diterapkan pada sektor publik dalam area pemerintahan. Di dalam kelembagaan pemerintahan tujuannya tidak mencari keuntungan, namun sumber pendapatannya dari pajak, lalu pertanggungjawaban

akhir kepada rakyat dihadapan pimpinan dan anggota DPRD. Peran Inspektorat yaitu sebagai pengawasan maksudnya sebagai lembaga negara diberikan kewenangan penuh dalam hal: 1) Melaksanakan pemeriksaan; 2) Melaksanakan evaluasi; 3) Melaksanakan review; 4) Melakukan konsultasi. Dari segi fungsinya, inspektorat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan, pengelolaan barang, pengelolaan pegawai dan tata kelola. Kemudian dari segi objek, melakukan pengawasan terhadap organisasi perangkat daerah yang berada di bawah pemerintahan Kabuapetn OKU, berdasarkan hasil observasi diketahui jika ada 67 pegawai ASN dan dalam pra penelitian ini mendapatkan hasil pra-survey penelitian kepada 30 pegawai pada Inspektorat guna menggambarkan mengenai pendidikan dan pelatihan terkait pemahaman sistem akuntansi publik.

**Tabel 1.1**

**Hasil Kuisisioner Pra-Survey Mengenai Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan Terhadap Pemahaman Akuntansi Sektor Publik Pada Pegawai Yang Bekerja Pada Kantor Inspektorat Baturaja**

No	Indikator	STS (1)		TS (2)		N (3)		S (4)		SS (5)		Total Skor	Skor Ideal	%
		F	N	F	N	F	N	F	N	F	N			
<b>Pendidikan</b>														
1	Pendidikan dasar	-	-	5	10	12	6	4	16	9	45	107	100	71,33
2	Pendidikan Menengah	-	-	10	20	15	15	2	8	3	15	88	100	58,67
3	Pendidikan Tinggi	-	-	7	14	13	9	3	12	7	35	106	100	70,67
<b>Pelatihan Kerja</b>														
1	Tujuan dan sasaran	-	-	7	14	13	9	2	8	8	40	106	100	70,67
2	Materi pelatihan	-	-	5	10	13	9	2	8	10	50	107	100	71,33
3	Metode Pelatihan	-	-	13	26	13	9	3	12	1	5	82	100	54,67

4	Para Pelatih	-	-	6	12	15	15	2	8	7	35	110	100	73,33
5	Peserta pelatihan	-	-	12	24	14	12	3	12	1	5	83	100	55,33
<b>Jumlah</b>												789	1.100	68,09
SS: Sangat Setuju, S: Setuju, N: Netral, TS: Tidak Setuju, STS: Sangat Tidak Setuju														
F= Frekuensi, N= Frekuensi x Skor, Jumlah Responden=30 orang, Jumlah Pernyataan=11														
Skor Ideal= Skor tertinggi x jumlah pernyataan x jumlah responden														

Sumber: Hasil Olah Data Kuisisioner Sementara, Desember (2021)

Ketidakpahaman aparaturnya pemerintah daerah tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menjadikan pendidikan dan pelatihan (diklat) sebagai upaya untuk mengatasi kesulitan dalam menyusun laporan keuangan. Hal ini selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil pasal 10 yang menyebutkan bahwa dalam upaya peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil, salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dalam jabatan.

Pemerintah daerah telah berupaya untuk menyusun laporan keuangan dengan menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah dengan kompetensi aparaturnya yang terdidik diharapkan mampu mewujudkan laporan keuangan daerah berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembenahan pengelolaan keuangan yang masih buruk, baik di pemerintah pusat maupun daerah tidak terlepas dari faktor penerapan standar akuntansi pemerintahan yang masih tergolong baru dilingkungan pemerintah. Hal-hal lain juga perlu diperhatikan bahwa pendidikan dan pelatihan adalah kebijaksanaan mengenai prioritas program dalam pendidikan dan pelatihan agar dapat meningkatkan dan memperbaiki kelemahan, serta meningkatkan pemahaman akuntansi sektor Publik pada pegawai negeri sipil, yang

profesional sesuai bidang tugasnya dan memiliki tingkat kerja yang disiplin, efisien, efektif, kreatif, produktif, serta tanggung jawab.

Dengan adanya pendidikan dan pelatihan yang sering diikuti oleh pegawai, maka dapat meningkatkan pemahaman terhadap akuntansi sektor publik, setelah melakukan observasi penulis menemukan fenomena yang terjadi yaitu ada beberapa para pegawai pemerintahan yang cukup mengetahui cara kerja dikarenakan tingkat pendidikan dan pelatihan yang cukup memenuhi syarat ketentuan khususnya di Kantor Inspektorat Baturaja yang memiliki jumlah pegawai pada bidang pemeriksaan keuangan SKPD di Kabupaten OKU berjumlah 67 orang dengan rincian 23 orang pegawai yang bertugasnya mengaudit laporan keuangan yaitu 5 inspektur, 14 auditor, 1 sekretaris dan 3 kasubbag. Hal ini berarti bahwa sebagian besar pegawai yang bekerja di Kantor Inspektorat Baturaja tidak berasal dari latar belakang pendidikan yang sesuai dengan posisinya, serta cukup memahami tentang akuntansi dikarenakan telah diberikan beberapa pendidikan dan pelatihan (diklat) yang diselenggarakan oleh pihak kantor hal tersebut untuk meningkatkan profesionalisme kerja.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti memfokuskan penelitian pada judul “Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan Terhadap Pemahaman Akuntansi Sektor Publik Pada Pegawai Yang Bekerja Pada Kantor Inspektorat Baturaja”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah penelitian ini adalah apakah ada pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap pemahaman akuntansi sektor publik pada pegawai yang bekerja pada Kantor Inspektorat Baturaja baik secara parsial maupun simultan.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap pemahaman akuntansi sektor publik pada pegawai yang bekerja pada Kantor Inspektorat Baturaja baik secara parsial maupun simultan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Manfaat teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Memberikan sumbangan ilmiah dalam bidang ekonomi sektor publik terutama tentang pendidikan dan pelatihan terhadap pemahaman akuntansi sektor publik.
- b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pendidikan dan pelatihan terhadap pemahaman akuntansi sektor publik serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

## 2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

### a. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang pendidikan dan pelatihan terhadap pemahaman akuntansi sektor publik.

### b. Bagi organisasi

Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran kepada pegawai inspektorat tentang pendidikan dan pelatihan terhadap pemahaman akuntansi sektor publik.

### c. Bagi peneliti lain

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk dijadikan bahan acuan dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa.